

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Tia Risandini¹, Youdhi Prayogo², and Laily Ifazah³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
tiarisandini15@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
youdhiprayogo@uinjambi.ac.id

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
Lailyifazah@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of clarity of budget targets and reporting systems on performance accountability at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Merangin Regency. This research uses quantitative methods and a causal associative approach, data collection techniques using questionnaires and the sample in this research was 47 employees at BPKAD Merangin Regency using purposive sampling techniques. Data analysis techniques are using descriptive statistics, data quality testing, classical assumption testing, multiple linear regression analysis and hypothesis testing. The results of this research partially show that the variables clarity of budget targets (X1) and reporting system (X2) have a significant effect on performance accountability (Y). Meanwhile, simultaneous testing shows a significant positive influence on performance accountability at BPKAD Merangin Regency.

Keywords: Clarity of Budget Targets, Reporting System, Performance Accountability.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan asosiatif kausal, teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner serta sampel dalam penelitian ini sebanyak 47 orang pegawai di BPKAD Kabupaten Merangin menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yaitu menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. Hasil pada penelitian ini secara persial menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran (X1), dan sistem pelaporan (X2), berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja (Y). Sedangkan pengujian secara simultan menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada BPKAD Kabupaten Merangin.

Kata Kunci: Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Akuntabilitas Kinerja.

1. Pendahuluan

Perpindahan sistem pemerintahan Republik Indonesia dari arah sentralisasi kearah sistem pemerintahan yang desentralisasi dalam wujud otonomi daerah yang sampai saat ini masih berdasarkan pada UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal yaitu anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan (Afilu Hidayattullah dan Irine Herdjiono, 2010).

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo yang menyatakan bahwa wujud dari penyelenggara otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat (Ahmad Rudi Yulianto, 2019).

Berdasarkan observasi yang peneliti temukan pada Laporan Kinerja (LKj) setelah reviu tahun 2021 dan tahun 2022 BPKAD Kabupaten Merangin, terdapat fenomena berupa penurunan realisasi kinerja pada BPKAD Kabupaten Merangin pada tahun 2021 ke tahun 2022. Dimana tahun 2021 hanya 1 (satu) kegiatan pada 1 (satu) program yang terealisasi tidak sesuai dengan target kinerjanya, namun pada tahun 2022 terdapat 2 kegiatan dalam 1 (satu) program yang tidak terealisasi sesuai dengan target kinerja yang telah ditentukan dan juga terjadi defisit anggaran pada tahun 2020 dan tahun 2021.

Akuntabilitas di pemerintahan sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konsep pemerintahan yg baik akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, maka nilai akuntabilitas sangatlah penting dalam mengelola pemerintahan. Hal ini didasarkan pada argumen, bahwa tidak ada suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).

Kejelasan sasaran anggaran menjadi suatu hal yang sangat relevan dan penting di lingkup pemerintahan karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Devika Diah Precelina dan Eni Wuryani, 2019).

Bukan hanya rencana anggaran, namun sistem pelaporan juga dibutuhkan untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu merealisasikan suatu anggaran, yang nantinya manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang telah ditentukan (Rohmah Putri Handayani, 2023).

Sistem pelaporan merupakan salah satu cara dari pengendalian akuntansi, karena dengan pengendalian maka instansi pemerintah dapat mengawasi dan menilai segala aktivitas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh suatu instansi. Dibutuhkan sistem pelaporan yang baik guna memantau dan mengendalikan kinerja menejer dalam menjalankan anggaran yang telah ditetapkan (Widaryanti dan Nurul Latifah Pancawardani, 2020).

2. Kajian Literatur

2.1 Stewardship theory

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah *stewardship theory*. Teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan keadaan para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan perorangan tetapi lebih fokus pada sasaran hasil utama pada kepentingan bersama (Lex Donaldson dan James H. Davis). Tidak hanya itu, teori ini memperkirakan jika terdapat hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, kesuksesan organisasi inilah yang menggambarkan maksimalisasi tujuan organisasi. Teori *stewardship* lebih cocok digunakan dalam instansi pemerintah yang mengarah pada pelayanan yang baik untuk masyarakat dan tidak berorientasi pada laba.

2.2 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program

dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No.16 tahun 2017). Supaya dapat memenuhi terwujudnya institusi sektor publik yang menjalankan prinsip akuntabilitas, maka dalam pelaksanaan akuntabilitas, organisasi sektor publik harus memuat beberapa dimensi berikut ini:

- a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum (accountability for probity and legality)
Dimensi akuntabilitas ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang telah diterapkan sebelumnya.
- b. Akuntabilitas proses (process accountability)
Dimensi akuntabilitas ini berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan tugas sudah cukup baik, termasuk dalam hal sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, hingga prosedur administrasi.
- c. Akuntabilitas program (program accountability)
Dalam dimensi akuntabilitas ini, memberikan pertimbangan mengenai tujuan yang ditetapkan apakah dapat tercapai atau tidak; serta apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal atau tidak.
- d. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability)
Dimensi akuntabilitas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil kepada masyarakat luas (Mardiasmo, 2018).

2.3 Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran memiliki definisi sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dengan tujuan supaya anggaran tersebut bisa difahami oleh orang yang memiliki tanggungjawab pada perolehan sasaran anggaran. Karena, sasaran anggaran daerah dijelaskan secara spesifik dan dapat dimengerti oleh orang yang memiliki tanggungjawab untuk menyusun dan melaksanakannya. Perencanaan anggaran daerah wajib merefleksikan sasaran kinerja yang jelas untuk menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diinginkan, dan nantinya dapat membawa pegawai dalam melaksanakan yang terbaik untuk misi yang diharapkan. Wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah manfaat sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai

akuntabilitas publik. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat (Mardiasmo, 2018).

Adanya kejelasan sasaran anggaran dapat memudahkan aparat pemerintah dalam penyusunan target-target anggaran yang ingin dicapai instansi pemerintah sehingga dapat mendorong para pegawai atau aparat pemerintah untuk meningkatkan kinerja pada instansi pemerintah. Dalam pandangan islam, kejelasan sasaran anggaran adalah suatu bentuk pertanggungjawaban kita terhadap Allah SWT, karena segala sesuatu yang kita perbuat di muka bumi Allah SWT akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti.

Dalam hal ini tujuan anggaran harus jelas dan spesifik agar dapat dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab atas sasaran anggaran tersebut agar pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 152.

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.” (Q.S Al-An'am ayat 152).”

2.4 Sistem pelaporan

Laporan kinerja dalam lingkungan sektor publik mempunyai peran penting dalam terbentuknya akuntabilitas sektor publik. Sistem pelaporan adalah bentuk tanggungjawab pada pemberian informasi atas pengalokasian anggaran terhadap pihak eksternal, internal maupun pihak yang memiliki keperluan. Dalam penyajian laporan keuangan maupun laporan kinerja, sistem pelaporan menjadi sebuah metode yang diperlukan. Sistem pelaporan yang baik dibutuhkan untuk melihat dan juga menilai kinerja dalam menggunakan anggaran yang telah ditetapkan (Faisol aziz, 2021).

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam menjalankan anggaran yang telah

ditetapkan (Abdullah, 2005). Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam menjalankan anggaran yang telah ditetapkan.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Husein Umar, 2020). Penelitian ini menjelaskan hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi dari variabel-variabel yang akan diteliti. Menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang akan digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dinyatakan dengan angka atau skala numerik (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pegawai BPKAD Kabupaten Merangin.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan *positivistic* (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono, 2018). Data tersebut berupa data primer, yang diperoleh dari skala kuesioner yang peneliti sebarakan kepada responden yang kemudian diolah dengan menggunakan SPSS.

Populasi dalam penelitian ini yaitu pegawai BPKAD Kabupaten Merangin yang berjumlah 90 orang. Sedangkan sampel pada penelitian ini sebanyak 47 responden dengan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan pendekatan *purposive sampling*.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

4.1.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik sampel yang digunakan dan menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimu	Maximu	Mean	Std.

		m	m		Deviation
Kejelasan Anggaran	47	17	25	21,64	2,005
Sistem Pelaporan	47	17	25	21,36	2,288
Akuntabilitas Kinerja	47	18	25	21,91	1,976
Valid N (listwise)	47				

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2023

Tabel di atas menunjukkan analisis statistik deskriptif masing-masing variabel. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 47. Dari hasil analisis deskriptif variabel akuntabilitas kinerja diperoleh nilai terendah (minimum) yaitu 18 dan nilai tertinggi (maximum) yaitu 25. Rata-rata (mean) kejelasan sasaran anggaran yaitu 21,91 dengan standar deviasi 1,976.

Kejelasan sasaran anggaran dalam penelitian ini memiliki nilai terendah (minimum) yaitu 17 dan nilai tertinggi (maximum) yaitu 25. Sedangkan nilai rata-ratanya (mean) yaitu 21,64 dengan standar deviasi 2,005. Sistem pelaporan dalam penelitian ini memiliki nilai terendah (minimum) yaitu 17 dan nilai tertinggi (maximum) yaitu 25. Rata-rata (mean) sistem pelaporan yaitu 21,36 dengan standar deviasi 2,288.

4.1.2 Uji Kualitas Data

4.1.2.1 Uji Validitas

Instrumen dalam penelitian ini berupa kuesioner dengan jumlah item pernyataan sesuai dengan indikator masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu X1 (kejelasan sasaran anggaran), X2 (sistem pelaporan), dan Y (akuntabilitas kinerja).

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan untuk uji validitas dapat diambil keputusan bahwa koefisien korelasi untuk setiap item dalam setiap butir pernyataan dengan skor keseluruhan untuk semua variabel adalah pada signifikan $< 0,05$ dan $R \text{ hitung} > R \text{ tabel}$. Dapat diartikan bahwa keseluruhan pernyataan setiap variabel dinyatakan valid.

4.1.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan suatu indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan secara konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Alpha	Batas	Kriteria
----	----------	-------	-------	----------

		Cronbach's	Reliabilitas	
1	Kejelasan Sasaran Anggaran	0,756	0,6	Reliabel
2	Sistem Pelaporan	0,779	0,6	Reliabel
3	Akuntabilitas Kinerja	0,785	0,6	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2023

Hasil uji reliabilitas pada penelitian untuk masing-masing variabel menunjukkan nilai Cronbach's Alpha > 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dinyatakan reliabel.

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

4.1.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel independen dan dependen berdistribusi normal atau tidak. Cara uji normalitas adalah dengan menggunakan uji satatistik (uji *kolmogorov smirnov*).

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Test		
		Unstandardized Residual
N		47
Normal Parameters ^a , b	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.30488685
Most Extreme Differences	Absolute	.112
	Positive	.112
	Negative	-.075
Test Statistic		.112
Asymp. Sig. (2-tailed)		.183 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2023

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov test di atas diperoleh nilai signifikan 0,183 > 0,05, artinya model regresi dapat memenuhi asumsi normalitas.

4.1.3.2 Uji multikolonieritas

Uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Hasil yang diharapkan dalam pengujian adalah titik terjadinya korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolonieritas dapat diketahui melalui *tolerance value* dan *variance factor* (VIF). Jika *tolerance value* lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolonieritas (Imam Ghazali, 2016).

Tabel 5. Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kejelasan Sasaran Anggaran	.643	1.556
	Sistem Pelaporan	.643	1.556
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja			

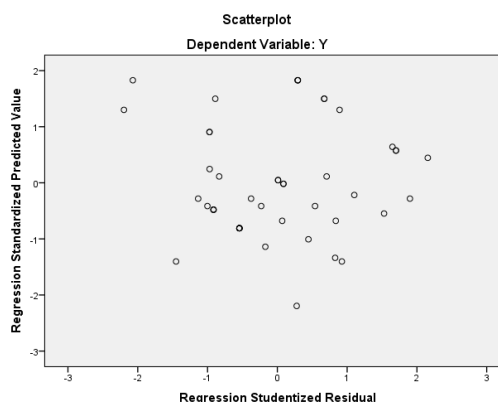
Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2023

Berdasarkan output SPSS yang dilihat dari tabel di atas, hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan memiliki nilai *tolerance* 0,643 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,556 < 10, hal ini berarti tidak terjadi multikolinieritas.

4.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak menghasilkan heteroskedastisitas (Imam Ghazali, 2018).

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedartisitas



Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2023

Dilihat dari grafik scatterplots di atas dapat disimpulkan bahwa titik-titik data menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola yang jelas, bergelombang melebar, menyempit dan melebar kembali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas hingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi.

4.1.4 Uji Regresi Linear Berganda

Uji linear berganda dilakukan untuk mengetahui sejauh mana korelasi variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.049	2.247		2.247	.030
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.490	.122	.497	4.001	.000
	Sistem Pelaporan	.293	.107	.340	2.735	.009
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja						

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2023

Dari tabel di atas diperoleh nilai-nilai koefisien sebagai berikut:

- Konstanta = 5.049
- Kejelasan Sasaran Anggaran = 0.490
- Sistem Pelaporan = 0.293

Jadi persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 5.049 artinya apabila variabel independen bernilai nol (0), maka variabel dependen akan bernilai tetap sebesar 5.049.
- Nilai koefisien regresi variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1) bernilai positif sebesar 0.490 artinya apabila variabel X_1 kejelasan sasaran anggaran mengalami peningkatan sebesar 1% sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka variabel Y akuntabilitas kinerja akan mengalami peningkatan sebesar 0.490 atau 49%.

3. Nilai koefisien regresi variabel sistem pelaporan (X_2) bernilai positif sebesar 0,293. Artinya apabila variabel X_2 Sistem pelaporan mengalami peningkatan sebesar 1% sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka variabel Y kejelasan sasaran anggaran akan mengalami peningkatan sebesar 0,293 atau 29,3%.

4.1.5 Uji Hipotesis

4.1.5.1 Uji t

Pengujian secara parsial (uji-t) dilakukan untuk menentukan apakah kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan secara parsial (individu) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Pengujian dilakukan dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$).

Tabel 7. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.049	2.247		2.247	.030
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.490	.122	.497	4.001	.000
	Sistem Pelaporan	.293	.107	.340	2.735	.009
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja						

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2023

1. Variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $4,001 > t$ tabel 1,667. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.
2. Variabel sistem pelaporan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $2,735 > t$ tabel 1,667. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

4.1.5.2 Uji F

Uji simultan dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$).

Tabel 8. Hasil Uji Statistik Deskriptif

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	101.334	2	50.667	28.463	.000 ^b
	Residual	78.326	44	1.780		
	Total	179.660	46			
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja						
b. Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran						

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2023

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 28.463. Hal ini menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel ($28.463 > 2,82$). Berdasarkan hasil regresi di atas diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dengan demikian $\alpha < 0,05$ artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel X1 (kejelasan sasaran anggaran) dan X2 (sistem pelaporan) secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y (akuntabilitas kinerja).

4.1.5.3 Koefisien determinasi (R^2)

Bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 menunjukkan kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.751 ^a	.564	.544	1.334
a. Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran				

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja
--

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2023

Dari hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai $R\ Square = 0,564$ atau 56,4%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas kinerja yang dipengaruhi oleh variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 56,4% sedangkan sisanya sebesar 43,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Pengujian hipotesis secara parsial pada variabel kejelasan sasaran anggaran menunjukkan nilai t hitung sebesar $4,001 > t$ tabel 1,667 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini mendukung hipotesis pertama yaitu kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Merangin telah terealisasi dengan baik sesuai dengan sasaran anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Semakin tinggi kejelasan sasaran anggaran yang terealisasi, maka akan semakin meningkatkan akuntabilitas kinerja dan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Eko Setiawan (2013) dengan judul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Palalawan, dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Palalawan.

4.2.2 Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Pengujian hipotesis secara parsial pada sistem pelaporan menunjukkan nilai t hitung sebesar $2,735 > t$ tabel 1,667 dengan signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$. Hal ini mendukung hipotesis kedua yaitu sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Dalam penelitian ini, sistem pelaporan yang tersedia pada BPKAD Kabupaten Merangin telah digunakan secara optimal dalam rangka mengembangkan dan mewujudkan akuntabilitas kinerja yang diharapkan. Dengan

demikian, semakin baik sistem pelaporan maka semakin tinggi akuntabilitas kinerja yang akan dicapai.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Afilu Hidayattullah dan Irine Herdjiono dengan judul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Skpd Di Merauke yang menyatakan jika variabel sistem pelaporan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang mencakup sistem pelaporan, akan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, dimana sistem pelaporan yang baik akan mencantumkan penjelasan mengenai penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil untuk mengoreksi penyimpangan yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi lebih efektif demi meningkatkan akuntabilitas kinerja.

4.2.3 Pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja

Pengujian hipotesis secara simultan pada variabel kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan yang dilakukan melalui uji F, menunjukkan nilai F hitung sebesar $28.463 > F \text{ tabel } 2,82$. Dimana variabel kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini mendukung hipotesis ketiga yaitu kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja BPKAD Kabupaten Merangin. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan yang jelas dapat meningkatkan kinerja manajerial khususnya pada pengelolaan keuangan pemerintah untuk mendukung terciptanya sebuah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Netty Herawaty yang berjudul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi, dimana menyatakan bahwa Hasil Penelitian memperlihatkan secara simultan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah di Kota Jambi.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini berusaha untuk menguji Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, hipotesis dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin.
2. Sistem Pelaporan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin.
3. Kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa, pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah
Bagi Pemerintah Kabupaten Merangin diharapkan dapat memperhatikan kejelasan sasaran anggaran dalam penyusunan anggaran dan lebih memberikan pelatihan atas penggunaan sistem informasi terbaru yang dipakai oleh pemerintah Kabupaten Merangin.
2. Bagi Instansi
Bagi para pegawai BPKAD Kabupaten Merangin diharapkan untuk terus mempertahankan dan memaksimalkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan memberikan edukasi seperti bimtek, workshop, seminar kepada pegawai terkait penggunaan sistem baru.
3. Bagi Peneliti selanjutnya
Peneliti sejenis selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan sampel dari instansi selain BPKAD Kabupaten Merangin.

Referensi

- Afilu Hidayatullah, Irine Herdjiono. (2015). "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD Di Merauke".
- As'ad, A., & Firmansyah, F. (2022). A New Paradigm on Human Resources Management in State Islamic University. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(1), 71–84. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i1.1513>
- Devika Diah Precelina And Eni Wuryani. (2019), "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jombang".
- Faishol Aziz. (2021). "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo)".
- Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS 25 Edisi Ke-9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husein Umar. (2020). Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis (*Metode Penelitian Ilmiah*), Jakarta: Raja Grafindo.
- Laporan Kinerja (LKJ) Setelah Reviu Tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin.
- Lex Donaldson and James H. Davis, "Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns," *Australian Journal of Management* 16, no. 1 (June 1991): 49–64.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta : Penerbit Andi).
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan edisi terbaru* (Yogyakarta : Penerbit Andi).
- M. Faisal Abdullah. (2005). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Nengsih, T. A. (2021). Jambi Province Economic Growth using Principal Component Regression in Islamic Economic Perspective. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 36(01). <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/Kontekstualita%0A>
- Nengsih, T. A., Bertrand, F., Maumy-Bertrand, M., & Meyer, N. (2019). Determining the number of components in PLS regression on incomplete data set. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology*, November. <https://doi.org/10.1515/sagmb-2018-0059>

- Republik Indonesia. 2015. Keputusan Menteri Pertahanan RI No: KEP/1255/M/XII/2015 Tentang Kebijakan Pertahanan Republik Indonesia. Jakarta : Kementrian Pertahanan.
- Rohmah Putri Handayani. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Menurut Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Sholihin, M., Shalihin, N., & Addiarrahman. (2023). the Scale of Muslims' Consumption Intelligence: a Maqāṣid Insight. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 15(2), 98–118. <https://doi.org/10.55188/ijif.v15i2.544>
- Subekti, A., Tahir, M., Mursyid, & Nazori, M. (2022). the Effect of Investment, Government Expenditure, and Zakat on Job Opportunity With Economic Growth As Intervening Variables. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 57(3), 102–112. <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.3.9>
- Sugiyono, (2016). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung:alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit Alfabeta, Bandung.
- Widaryanti And Nurul Latifah Pancawardani, "Analisis Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah," *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 15, No. 2 : 477–492.
- Yulianto, Ahmad Rudi. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati. Vol.14, No 2.